

## Eksplorasi Paradigma dan Praktik Akuntansi Keberlanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Audito Aji Anugrah, Daniel Sugama Stephanus

Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, Jalan Villa Puncak Tidar N-01, Malang, Indonesia

**Correspondence:** Audito Aji Anugrah (audito.aji@machung.ac.id)

Received: 06 12 23 – Revised: 08 12 23 - Accepted: 09 12 23 - Published: 25 12 23

### Abstrak

Akuntansi Keberlanjutan pengembangan cabang keilmuan Akuntansi yang berfokus pada praktik-praktik ekonomi berkelanjutan. Keilmuan Akuntansi tidak hanya berfokus dan berorientasi kepada profit saja, namun juga mengukur nilai dampak aktivitas sosial dan lingkungan Perusahaan. Akuntansi Keberlanjutan merupakan penggabungan antara keilmuan Akuntansi Sosial dan Akuntansi Lingkungan. Pergeseran bisnis saat ini hampir menyeluruh untuk berorientasi pada keberlanjutan. Pandangan tersebut dipengaruhi sebuah pandangan melalui *Teori Tripple Bottom Line*. Selain sektor bisnis, seluruh negara secara global saat ini menerapkan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang terdiri dari 17 Indikator pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara dari Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjadikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai indikator dalam Pembangunan nasional. Indikator tersebut dijadikan landasan dengan diterbitkannya regulasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melalui artikel ini, harapannya dapat menjadi sebuah eksplorasi paradigma bersama terkait bidang kajian keilmuan Akuntansi Keberlanjutan dan juga praktik-praktik akuntansi keberlanjutan didalam sektor bisnis. Selain itu, melalui artikel ini akan memberikan peluang dan tantangan dalam mempelajari keilmuan akuntansi serta bagaimana keilmuan ini berdampak terhadap kepada para pemangku kepentingan. Peluang dan Tantangan ini menjadi perhatian bersama dan menjadi bagian dari fokus bersama untuk dihadapi. Agar para pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam menerapkan keilmuan Akuntansi Keberlanjutan bersama-sama untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Sustainability Accounting*, Akuntansi Keberlanjutan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

---

**Citation Format:** Anugrah, A. A., & Stephanus, D.S. (2023). Eksplorasi Paradigma dan Praktik Akuntansi Keberlanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Ma Chung (SENAM)*, 2023, (pp. 01-14)

---

## PENDAHULUAN

Keilmuan akuntansi saat ini terus berkembang adaptif dan dinamis. Perkembangan keilmuan akuntansi membangun sebuah pandangan paradigma baru. Saat ini, keilmuan akuntansi tidak hanya berfokus pada “*economic bottom line*” (Aziza & Sukoharsono, 2021). *Economic bottom line* yaitu perusahaan hanya berfokus dan berorientasi kepada profit dan tidak memperhatikan dari sisi aspek sosial dan aspek lingkungan. Sehingga di era sebelum tahun 1990 banyak sekali perusahaan-perusahaan berfokus pada profit yang menimbulkan praktik-praktik eksploitatif dan menyebabkan berbagai masalah sosial dan masalah lingkungan. Pada era tersebut, umumnya profit sekadar sebagai kelebihan pendapatan dan biaya yang diakui sebagai milik entitas bisnis, serta mengabaikan faktor lingkungan yang menunjang tercapainya profit. Baker & Modell (2019) menyatakan bahwa cara demikian merupakan konsep entitas yang tidak memperhatikan keberlangsungan hidup perusahaan dan menjadi permasalahan atau bola salju bagi perusahaan.

Adanya berbagai dampak yang timbul dan dirasakan oleh perusahaan-perusahaan, maka banyak perusahaan mulai beralih untuk tidak hanya berfokus pada profit atau *economic bottom line* saja. Sehingga pada tahun 1997, John Elkington menyuarakan sebuah gagasan *Triple Bottom Line* dengan motto “*People & Planet Before Profit*”. (Elkington, 1997). Teori *Triple Bottom Line* menyatakan bahwa bisnis agar dapat tumbuh berkelanjutan (*Sustain*) dengan memperhatikan unsur nilai *people*, *planet* dan *profit* secara berkesinambungan, penyesuaian atas kinerja sosial (*people*), penyesuaian atas kinerja lingkungan (*planet*), dan penyesuaian atas kinerja laba (*profit*). Sehingga dari adanya gambaran teori tersebut melahirkan keilmuan dibidang Akuntansi Sosial (*Social Accounting*) dan Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*)

*Triple Bottom Line* yang harus dilaksanakan oleh perusahaan agar dapat berkelanjutan melalui aktivitas-aktivitas tanggung jawab perusahaan yaitu Aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan. Aktivitas tanggung jawab yang dilakukan perusahaan berlandaskan TBL juga harus berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan (Apriliani & Abdullah, 2018). Sehingga dari teori tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan subjek keilmuan akuntansi dibidang akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan selanjutnya dengan muncul keilmuan baru yaitu Akuntansi Keberlanjutan (*Sustainability Accounting*).

Akuntansi Keberlanjutan (*Sustainability Accounting*) merupakan bentuk dari proses penggabungan Akuntansi Sosial (*Social Accounting*) dan Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*) serta Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*). Peran Akuntansi keberlanjutan (*Sustainability Accounting*) saat ini menjadi motor penggerak (*driven*) dalam keilmuan akuntansi dan menjadi kebutuhan daya dukung praktik untuk menjalankan keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal tersebut didukung dengan adanya konsep yang saat ini menjadi fokus perhatian bersama oleh negara-negara di dunia yaitu *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

*Sustainable Development Goals* (SDG's) pertama kali didengungkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 (Pangestu *et al.*, 2021). Adanya landasan acuan penerapan kebijakan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) ini menjadi praktik bagaimana keilmuan akuntansi dapat berperan secara lebih komprehensif melalui perspektif Akuntansi Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan saat ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memiliki 17 Tujuan (*Goals*) yang harus dicapai.

## MASALAH

Melalui artikel ini, maka penulis mencoba melakukan eksplorasi kajian terhadap paradigma Akuntansi Keberlanjutan (*Sustainability Accounting*) dengan judul jurnal Eksplorasi Praktik dan Paradigma Akuntansi Keberlanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

## METODE PELAKSANAAN

Pada artikel ini, penulis akan melakukan eksplorasi paradigma Akuntansi Keberlanjutan (*Sustainability Accounting*) melalui berbagai studi pustaka. Studi Pustaka ini diambil oleh peneliti melalui beberapa artikel ilmiah penelitian dan referensi melalui buku mengenai Akuntansi Berkelanjutan (*Sustainability Accounting*). Selain upaya eksplorasi pada artikel ini, peneliti juga mencoba untuk mengontruksi paradigma Akuntansi Keberlanjutan, perkembangan dan urgensinya saat ini yang lahir sebagai keilmuan akuntansi yang berfokus dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, merupakan agenda global yang komprehensif dan ambisius untuk mengatasi tantangan-tantangan yang paling mendesak di dunia. Ke-17 tujuan yang saling berhubungan ini mencakup beragam tujuan, mulai dari pengentasan kemiskinan dan nol kelaparan hingga pendidikan berkualitas, aksi iklim, dan gender.



**Gambar 1.** Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Sumber: [globalgoals.org](http://globalgoals.org)

Menurut Mayarni, *et al.*, (2020), pembangunan keberlanjutan adalah pemenuhan kebutuhan di masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan di masa depan. Pembangunan berkelanjutan diimplementasikan dalam 17 item “*sustainability development goals*”, yaitu:

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesenjaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Ekosistem lautan
15. Ekosistem daratan
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Indonesia juga menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai indikator pembangunan berkelanjutan negara. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) telah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Presiden (Perpres) No.111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Peraturan Menteri Peraturan Menteri No 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (dokumen RAN dan RAD), Keputusan Menteri, dan Peraturan lainnya terkait SDGs (termasuk Peraturan Kementerian PPN/Bappenas, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementrian DESA PDPTT. Indikator tersebut dipakai dalam seluruh kegiatan aktivitas pembangunan di Indonesia. Baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Non Pemerintah. Menurut Bappenas (2023) dari capaian indikator SDGs terangkum dalam empat pilar pembangunan nasional yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

a. Pilar Pembangunan Sosial

Pilar Pembangunan Sosial merupakan Pilar yang memiliki tujuan untuk tercapainya pemenuhan dalam hak dasar manusia yang berdasarkan.yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Adapun pilar pembangunan sosial ini terdapat 5 Tujuan (*Goals*) sebagai berikut.

**Tabel 1.** Pilar Pembangunan Sosial Edisi II  
Sumber Data: Bappenas (2023)

Pilar Pembangunan Sosial			
No	Goals	Target	Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	7 Target	15 Indikator
2	Tanpa Kelaparan	8 Target	17 Indikator
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	13 Target	36 Indikator
4	Pendidikan Berkualitas	10 Target	14 Indikator
5	Kesetaraan Gender	9 Target	12 Indikator

## b. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar Pembangunan Ekonomi merupakan pilar yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan industri, inovasi, infrastruktur yang memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Adapun Pilar Pembangunan Ekonomi terdapat 4 Tujuan (*Goals*) sebagai berikut.

**Tabel 2.** Pilar Pembangunan Ekonomi Edisi II Sumber Data: Bappenas (2023)

Pilar Pembangunan Ekonomi			
No	Goals	Target	Indikator
1	Energi Bersih dan Terjangkau	5 Target	8 Indikator
2	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	12 Target	22 Indikator
3	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	8 Target	21 Indikator
4	Berkurangnya Kesenjangan	10 Target	17 Indikator
5	Kemitraan untuk Mencapai	19 Target	24 Indikator

## c. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar Pembangunan Lingkungan merupakan pilar yang tujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar Pembangunan Lingkungan merupakan pilar yang berfokus pada isu keberlangsungan lingkungan. Adapun pilar Pembangunan Lingkungan terdiri dari 6 Tujuan (*Goals*) sebagai berikut.

**Tabel 3.** Pilar Pembangunan Lingkungan Edisi II  
Sumber Data: Bappenas (2023)

Pilar Pembangunan Lingkungan			
No	Goals	Target	Indikator
1	Air Bersih dan Sanitasi Layak	8 Target	8 Indikator
2	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	10 Target	16 Indikator
3	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	11 Target	16 Indikator
4	Penanganan Perubahan Iklim	5 Target	11 Indikator
5	Ekosistem Lautan	10 Target	10 Indikator
6	Ekosistem Daratan	12 Target	14 Indikator

d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara dan berdasarkan hukum dan tata kelola dengan baik. Pilar Pembangunan hukum dan tata kelola terdiri dari 1 Tujuan (*Goals*) sebagai berikut.

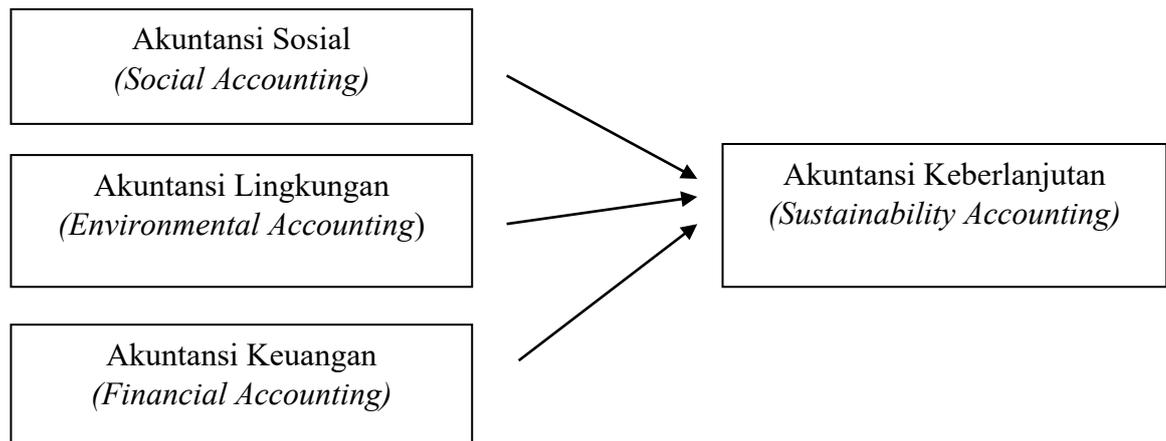
**Tabel 4.** Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Edisi II  
Sumber Data: Bappenas (2023)

Pilar Pembangunan Lingkungan			
No	Goals	Target	Indikator
1	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh	12 Target	38 Indikator

## 2. Praktik Akuntansi Keberlanjutan dalam melahirkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Adanya tujuan pembangunan berkelanjutan memberikan dampak terhadap keilmuan akuntansi yang saat ini melahirkan poros keilmuan akuntansi keberlanjutan (*Sustainability Accounting*). Akuntansi keberlanjutan (*Sustainability Accounting*) menurut Polejewski (2011) adalah sebuah sistem akuntansi yang ditujukan untuk menjalankan strategi keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan juga merupakan perkembangan dari akuntansi sosial dan lingkungan hasil keluaran (*output*) pelaporannya berupa kinerja non-keuangan entitas. Kinerja non-keuangan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan segala dampak langsung terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan serta Akuntansi Keuangan.

Proses keberlanjutan ini harus dipahami secara bersama oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis. Ketika konsep keberlanjutan telah dijiwai suatu organisasi maka segala strategi, kebijakan dan tindakan organisasi akan selalu mengandung prinsip keberlanjutan. (Aziza & Sukoharsono, 2021). Sehingga kebersamaan dalam menerapkan prinsip berkelanjutan akan berdampak pada penerapan praktik akuntansi berkelanjutan di dalam kegiatan bisnis.



**Gambar 2.** Konsep Akuntansi Keberlanjutan  
Sumber Data: Diolah (2023)

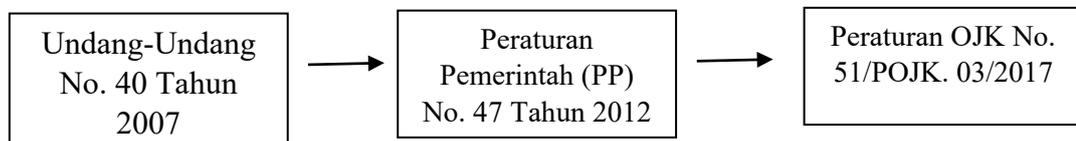
Penelitian terkait dengan keilmuan Akuntansi keberlanjutan dan dampaknya saat ini telah dilakukan oleh berbagai penelitian. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Zhang, *et al.*, (2022) terkait dengan dampak terkait dengan praktik akuntansi keberlanjutan terhadap kinerja keuangan menghasilkan bahwa praktik akuntansi berkelanjutan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan di lintas industri. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Luo & Ma (2021) menunjukkan hasil bahwa praktik akuntansi berkelanjutan memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan di berbagai industri.

Penerapan dan praktik keilmuan Akuntansi keberlanjutan (*Sustainability Accounting*) tercermin melalui adanya konsep Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Reporting*). Menurut Kusniah & Lestari (2019), Laporan Berkelanjutan adalah laporan yang dibuat oleh organisasi dalam hal pengungkapan (*disclose*) dan pengomunikasian tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada para pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Laporan ini memuat informasi keuangan dan non keuangan perusahaan yang dapat menciptakan dialogis antar manajemen dengan para *stakeholder*-nya.

Laporan berkelanjutan (*Sustainability Report*) mengacu pada *Global Reporting Index* (GRI). Di Indonesia, Proses perkembangan penerapan Laporan berkelanjutan ini diterapkan secara bertahap yaitu dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pada tahapan ini, perusahaan wajib menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta melaporkannya melalui Laporan berkelanjutan (*Sustainability Report*) dengan kerangka acuan melalui GRI 3.0 Setelah adanya aturan undang-undang yang berlaku

lalu muncul Peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada pelaporan ini menggunakan perspektif GRI 3.1.

Seiring berjalannya waktu terkait dengan perkembangan Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan Laporan berkelanjutan yang diatur dalam aturan Peraturan OJK No. 51/POJK. 03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik. Pada peraturan ini, semua perusahaan menerbitkan laporan berkelanjutan dengan kerangka GRI 4.0 yang mana di tahun 2018 wajib menerbitkan Laporan berkelanjutan tersebut.



**Gambar 3.** Landasan Hukum Penerapan Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) Di Indonesia  
Sumber Data: Diolah (2023)

Perkembangan saat ini, ada proses keterbaruan dari Laporan Berkelanjutan, proses tersebut berevolusi dari Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) menjadi Laporan Terintegrasi (*Integrated Reporting*). Laporan Terintegrasi yaitu terdiri dari penambahan unsur Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) ditambahkan dengan elemen unsur *Entreprise Risk Management* dan *Good Corporate Governance*. Pada tahun 2010 terbentuklah *International Integrated Reporting Council (IIRC)* yang mengembangkan laporan terintegrasi atau *Integrated Reporting (IR)*. Pedoman yang digunakan dalam IR adalah *Integrated Reporting Framework* (Ahmad & Sari, 2017). Adapun di Indonesia, Laporan terintegrasi masih belum diwajibkan dan bersifat *voluntary* bagi perusahaan yang ingin melaporkan sesuai dengan acuannya.

PricewaterhouseCoopers (2013) dalam artikelnya menjelaskan bahwa perusahaan yang menggunakan konsep Laporan Terintegrasi dimungkinkan menghasilkan laporan yang lebih transparan dan dapat meningkatkan akses perusahaan mendapatkan modal. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Cheng, *et al.*, (2014) dan Utami, (2016) bahwa Laporan Terintegrasi memiliki manfaat untuk

meningkatkan transparansi di dalam operasi perusahaan, dengan meningkatnya transparansi maka akan meningkatkan kepercayaan bagi *stakeholder*.

Peran tersebut tentunya merupakan proses dari bagian dari perkembangan keilmuan Akuntansi Keberlanjutan. Di Indonesia, saat ini banyak keilmuan Akuntansi Keberlanjutan diterapkan dan dijadikan sebagai landasan hukum oleh pemerintah yang ditujukan kepada perusahaan. Adapun tujuannya yaitu agar perusahaan dapat memberikan kontribusi tujuan pembangunan keberlanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan dilihat sejauh mana ukuran kontribusinya. Sehingga perkembangan dan praktik keilmuan dapat ditarik garis besar bahwa Akuntansi Keberlanjutan ini dapat digunakan sebagai alat dalam melihat bagaimana kontribusi tujuan pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan. Selain itu, Akuntansi keberlanjutan sebagai keterbaruan keilmuan di Akuntansi dapat memberikan dampak signifikan khususnya bagi keberlangsungan bisnis perusahaan.

### **3. Urgensi dan Tantangan Akuntansi Keberlanjutan (*Sustainability Accounting*) dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Peran Akuntansi Keberlanjutan sebagai bidang keilmuan Akuntansi perlu menjadi fokus perhatian bagi seluruh elemen pemangku kepentingan (*stakeholder*). Keilmuan Akuntansi Keberlanjutan dapat memberikan peran dalam menciptakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dan juga dapat diterapkan di masing negara-negara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keilmuan ini berperan untuk menyajikan tidak hanya sisi tanggung jawab keuangannya saja, namun juga sisi tanggung jawab non keuangan (sosial dan lingkungan) oleh perusahaan yang mana aktivitas tersebut juga wajib diukur untuk memperoleh keabsahaan informasi yang dapat disajikan kepada para pemangku kepentingan

Pemerintah sebagai salah satu pemangku kebijakan melalui pendekatan Akuntansi keberlanjutan dapat menjadikan keilmuan tersebut salah satu alat untuk mendapatkan informasi sejauh mana kontribusi perusahaan dalam memberikan sumbangsih terhadap pembangunan berkelanjutan sesuai dengan 17 tujuan yang dicapai. Sehingga pemerintah dapat memonitor kegiatan aktivitas bisnis dari berbagai perusahaan yang mana harus menjalankan tanggung jawab keuangan, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab Perusahaan.

Keilmuan Akuntansi Keberlanjutan masih sangat sedikit dipelajari oleh para akuntan dan upaya meminati bidang keilmuan ini. Untuk meningkatkan daya dongkrak perusahaan untuk memberikan sumbangsih dalam tujuan pembangunan berkelanjutan maka tentunya perlu ditingkat untuk para akuntan untuk dapat *concern* dibidang keilmuan ini. Sehingga perlu adanya peran Pendidikan dan kurikulum pengajaran didalam program studi akuntansi.

Namun juga perlu menjadi perhatian bahwa dalam menerapkan Akuntansi Keberlanjutan penuh dengan tantangan yang seringkali dihadapkan oleh kesiapan internal Perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abubakar, *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa Perusahaan seringkali tidak memiliki pemahaman cukup tentang konsep dan manfaat praktik akuntansi keberlanjutan. Sehingga tidak sedikit juga Perusahaan enggan menerapkan di perusahaannya karena faktor ketidaktahuan pengetahuan dalam proses mengukur dan melaporkan kinerja berkelanjutan.

Selain dari faktor kesiapan dari Internal Perusahaan, dalam penerapan Akuntansi Keberlanjutan juga dihadapkan dengan kondisi terhadap pengukuran aktivitas sosial dan lingkungan sebuah Perusahaan. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Xu, *et al.*, (2023) menyatakan terdapat beberapa kendala dalam mengintegrasikan praktik akuntansi keberlanjutan terhadap sistem akuntansi yang telah ada. Perusahaan seringkali dihadapkan dengan kondisi dengan tingkat kesulitan dalam memproses data yang relevan dalam mengukur dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis perusahaannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa Akuntansi Keberlanjutan ini masih dapat terus dikaji lebih dalam dan berpotensi dapat berkembang menyempurnakan konsep yang sudah ada dan berpotensi melahirkan konsep baru dalam melakukan pengukuran dampak sosial dan lingkungan yang lebih komprehensif dan intergrasi dengan nilai Perusahaan.

## KESIMPULAN

Akuntansi Keberlanjutan (*Sustainable Accounting*) merupakan keilmuan akuntansi yang saat ini menjadi salah satu keilmuan dibidang akuntansi berperan sangat penting dalam proses pembangunan berkelanjutan. Adapun peran tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap (*Stakeholder*) baik dari sudut pandang Perusahaan maupun juga Pemerintah. Kontribusi tersebut menciptakan sinergitas dalam bergerak bersama mencapai

misi berkelanjutan dan integrasi. Sehingga dengan adanya proses keduanya bersinergi dapat membawa misi berkelanjutan bagi pembangunan negara.

Wujud bentuk konkrit nyata Penerapan Akuntansi berkelanjutan yaitu dengan adanya praktik keuangan berkelanjutan yang mana membawa Perusahaan tidak hanya berfokus hanya kepada profit, namun juga memperhatikan dampak sosial dan dampak lingkungan yang secara langsung dapat menciptakan keberlangsungan usaha sebuah Perusahaan. Selain itu, saat ini Perusahaan dituntut untuk dapat memberikan laporan yang terintegrasi yang menyajikan laporan keuangan, laporan kegiatan aktivitas sosial dan laporan kegiatan aktivitas lingkungan. Hal tersebut didukung berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai Akuntansi Berkelanjutan (*Sustainable Accounting*) yang mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik Akuntansi Berkelanjutan memiliki dampak terhadap Perusahaan.

Pemerintah sebagai regulator dapat menjadikan Akuntansi Berkelanjutan sebagai salah satu alat dalam memastikan proses Pembangunan berkelanjutan berjalan sesuai dengan misi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adanya proses tersebut, maka Akuntansi Berkelanjutan menjadi peluang bagi para akuntan dapat mempelajari keilmuan ini dan menjadi peluang bagi para akuntan untuk menerapkan implementasi Akuntansi keberlanjutan di berbagai sektor perusahaan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan juga bahwa banyak dari perusahaan yang enggan menerapkan Akuntansi Keberlanjutan dikarenakan ketidaktahuan pengetahuan akan konsep, pengukuran dan melaporkan kinerja berkelanjutan. Selain itu, berdampak juga terkait dengan sistem akuntansi didalam perusahaan yang masih sulit untuk disesuaikan. Adanya peluang tersebut, para Akuntan dapat mengisi peran tersebut untuk dapat mengimplementasikan praktik akuntansi keberlanjutan kepada perusahaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada para sejawat dan pemerhati para akuntan di bidang Akuntansi Keberlanjutan (*Sustainability Accounting*). Semoga dengan adanya artikel ini dapat menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan untuk dapat mengembangkan keilmuan Akuntansi Keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. M., Kamardin, H., Ameer, R., & Zainal, A. Z. (2023). Sustainable accounting practices: Barriers to adoption and implementation in developing countries. *Sustainability*, 15(1), 251.
- Ahmad, R., & Sari, R. C. (2017). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP Terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka Integrated Reporting. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 125-135.
- Aziza, W. Q. A., & Sukoharsono, E. G. (2021). Evolusi Akuntansi Keberlanjutan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10), 5371-5388.
- Apriliani, M., & Abdullah, M. W. (2018). Falsafah Kesenian Tanjidor Pada Pelaksanaan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 377-393. [://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9023](https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9023)
- Baker, M., & Modell, S. (2019). Rethinking Performativity: A Critical Realist Analysis of Accounting for Corporate Social Responsibility. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(4), 930-956. <https://doi.org/10.1108/AAAJ11-2017-3247>
- Bappenas. (2023). <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Metadata-Pilar-Sosial-Edisi-II.pdf> (diakses tanggal 6 Desember 2023)
- Bappenas. (2023). <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Metadata-Pilar-Ekonomi-Edisi-II.pdf> (diakses tanggal 6 Desember 2023)
- Bappenas. (2023). <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Metadata-Pilar-Lingkungan-Edisi-II.pdf> (diakses tanggal 6 Desember 2023)
- Bappenas. (2023). <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Metadata-Pilar-Hukum-Edisi-II.pdf> (diakses tanggal 6 Desember 2023)
- Cheng, M., Green, W., Conradie, P., Konishi, N., & Romi, A. (2014). The international integrated reporting framework: key issues and future research opportunities. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 25(1), 90-119.
- Elkington, J. (1997). The triple bottom line for 21st century business. *Journal of Experimental Psychology: General*, 136.
- Luo, M., & Ma, Y. (2021). The impact of sustainable accounting practices on financial performance: Evidence from diverse industries. *Sustainability*, 13(7), 4002.
- Mayarni, M., Meiwanda, G., & Zulkarnaini, Z. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Teoritis dan Empiris.

- Pangestu, F. P., Rahmadiani, N. S., Hardiyanti, N. T., & Yusida, E. (2021, June). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Goals*) 2030. In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan (Vol. 1, No. 3, pp. 210-219).
- Polejewski, S. (2011). Sustainability Accounting and Reporting. Accounting Instructor's Report2, Summer.
- PricewaterhouseCoopers. (2013). Point of View Integrated Reporting Going Beyond The Financial Results. United States. Diunduh pada tanggal 19 Januari 2017. Dari [www.pwc.com](http://www.pwc.com)
- Utami, K. (2016). Disclosure dan Cost of Capital: Implementasi Integrated Reporting di Asia Pasifik. Simposium Nasional Akuntansi XIX, 1-23.
- Xu, L., Zeng, S., Zhang, Y., & Tam, V. W. (2023). Challenges of integrating sustainable accounting practices into existing accounting systems: Insights from Chinese firms. *Sustainability*, 15(2), 581.
- Zhang, Z., Zhou, J., & Huang, J. (2022). The effect of sustainable accounting practices on financial performance: A cross-industry analysis. *Sustainability*, 14(1), 235.

